

## ANALISIS PERKEMBANGAN PENERIMAAN DAERAH DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP TOTAL PENERIMAAN DAERAH DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2009-2013

Yeni Evriani

Program Studi DIV Keuangan Daerah Universitas Jambi

### Abstrak

Penelitian ini berjudul “Analisis Perkembangan Penerimaan Daerah dan Kontribusinya Terhadap Total Penerimaan Daerah di Kabupaten Bungo Tahun 2009-2013”. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui perkembangan penerimaan daerah, menganalisis besarnya Kontribusi Penerimaan Daerah Terhadap Total Penerimaan Daerah, serta mengetahui Tingkat Kemandirian Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bungo tahun 2009- 2013. Berdasarkan hasil analisis perkembangan penerimaan daerah menurut sumber penerimaan daerah kabupaten bungo tahun 2009-2013 terlihat rata-rata keseluruhan perkembangan penerimaan daerah sebesar 15,95%. Hal ini menunjukkan secara keseluruhan perkembangan penerimaan daerah kabupaten bungo semakin meningkat setiap tahun anggarannya dari tahun 2009-2013, Kontribusi dari masing-masing penerimaan daerah terhadap total penerimaan daerah kabupaten bungo tahun 2009-2013, dimana kontribusi paling kecil dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya adalah kontribusi yang berasal dari PAD dengan rata-rata kontribusi sebesar 8,04%, dapat dinyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten bungo masih belum mampu sepenuhnya untuk mengelola sumber-sumber keuangannya dan masih bergantung pada pemerintah pusat. Persentase tingkat kemandirian keuangan pendapatan asli daerah kabupaten bungo terhadap keuangan pemerintah pusat pada tahun 2009-2013 pada persentase antara 7,38% sampai dengan 8,55% yang mempunyai pola hubungan instruktif yang artinya bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah karena masih belum mampu melaksanakan otonomi daerah.

**Kata Kunci:** Penerimaan Daerah, Kontribusi Penerimaan, Kabupaten Bungo

### Abstract

This study is titled “Analysis of Regional Revenue Development and Its Contribution to Total Regional Revenue in Bungo Regency from 2009 to 2013.” The objectives of this research are to examine the development of regional revenue, analyze the contribution of regional revenue to total regional income, and determine the level of independence of locally generated revenue in Bungo Regency during the period of 2009–2013. Based on the analysis of regional revenue development by source in Bungo Regency from 2009 to 2013, it is shown that the average overall growth in regional revenue was 15.95%. This indicates that the overall development of regional revenue in Bungo Regency increased each fiscal year from 2009 to 2013. The contribution of each revenue source to the total regional revenue during that period revealed that the smallest contribution came from locally generated revenue (Pendapatan Asli Daerah, or PAD), with an average contribution of 8.04%. This suggests that the local government of Bungo Regency has not yet been fully capable of managing its financial resources and remains dependent on the central government. The percentage of financial independence of Bungo Regency’s locally generated revenue compared to central government funding from 2009 to 2013 ranged between 7.38% and 8.55%, reflecting an instructive relationship pattern—meaning that the

*role of the central government remains dominant due to the region's limited ability to fully implement regional autonomy.*

**Keywords:** *Regional Revenue, Revenue Contribution, Bungo Regency*

## 1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam perkembangannya telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, perlu menempatkan sektor penerimaan daerah sebagai salah satu

perwujudan kewajiban kenegaraan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Penerimaan Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah Kabupaten Bungo.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah, dimana pemerintah daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggung jawab yang hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Transformasi paradigma dalam hal ini terletak pada aspek akuntabilitas pemerintah daerah dalam rangka mengelola sumber-sumber ekonomi yang semula bersifat akuntabilitas *vertical* (kepada pemerintah) menjadi akuntabilitas *horizontal* (kepada masyarakat di daerah) (Mardiasmo, 2002). Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Kabupaten Bungo merupakan salah satu kabupaten yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan guna mensejajarkan dengan daerah lain. Berbagai upaya terus dilaksanakan daerah guna meminimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), kerja keras daerah terlihat dengan adanya berbagai terobosan dan potensi untuk menggali sumber dan potensi daerah, terutama penerimaan yang merupakan penerimaan yang cukup besar terhadap keuangan daerah.

Pengeluaran Pemerintah Daerah terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat kebijakan fiskal pemerintah yang digunakan untuk mengelola perekonomian daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga merupakan salah satu rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran (Halim, 2002). Anggaran Pendapatan Belanja Daerah juga diartikan sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP No.24 Tahun 2005).

Sedangkan menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberikan otonomi dan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adapun sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Penerimaan Daerah yang merupakan sumber pembiayaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sangat mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang telah diatur lebih lanjut pada undang-undang, berdasarkan prinsip transparansi telah menunjukkan dan memberikan perubahan serta penting sekali dalam membiayai pembangunan dalam era otonomi terutama untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggungjawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan ini mencerminkan upaya untuk menjamin stabilitas pertumbuhan dan pemerataan. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan pendayagunaan potensi-potensi yang dimiliki secara optimal. Dalam rangka melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan daerah tertentu memerlukan biaya yang cukup besar, agar pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang cukup, tetapi mengingat tidak semua sumber-sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pendanaan penyelenggaraan pemerintah dapat terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pendanaan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibiayai oleh APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dibiayai oleh APBN.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD yang salah satunya berasal dari pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Penerimaan Daerah dalam bentuk uang yang masuk kedalam kas daerah merupakan penerimaan dalam pelaksanaan desentralisasi yang telah diatur sebelumnya oleh Undang-undang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pendapatan Lain Yang Sah.

PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah sebelumnya kurang mendapat perhatian, keadaan ini disebabkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, sumber dana pembangunan daerah sebagian besar diperoleh dari pemerintah pusat sementara kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur penggunaan dana tersebut relatif terbatas. Kemandirian pemerintah kabupaten/kota dapat dilihat dari besarnya PAD

yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota tersebut. Semakin besar PAD yang diperoleh oleh kabupaten dan kota tersebut untuk membiayai pengeluaran dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat, maka akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Kabupaten Bungo merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Barat Provinsi Jambi yang pada Tahun 2009 dimekarkan, sebagai Kabupaten induk penerimaan daerah Kabupaten Bungo terus mengalami peningkatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1. Penerimaan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009-2013**

Tahun	Penerimaan Daerah (Juta Rupiah)
2009	520.412.279.564,53
2010	620.682.985.437,70
2011	709.877.708.272,21
2012	793.972.772.126,72
2013	939.675.234.575,81

*Sumber : BPS Kabupaten Bungo*

Dari tabel di atas terlihat bahwa Penerimaan Daerah Kabupaten Bungo pada Tahun 2009 sebesar Rp. 520.412.279.564,53, dan pada tahun 2011 sebesar Rp.709.877.708.272,21. Sedangkan total penerimaan daerah pada tahun 2013 sebesar Rp. 939.675.234.575,81. Tergambar dari tahun ke tahun penerimaan daerah di Kabupaten Bungo mengalami peningkatan. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana kontribusi perkembangan penerimaan daerah itu terhadap total penerimaan daerah.

Penelitian tentang penerimaan daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu antara lain seperti Aidayani (2013) yang meneliti di Kabupaten Sarolangun hasil penelitiannya bahwa kontribusi yang paling besar yaitu dari dana Perimbangan atau dari pemerintah pusat, berarti daerah Kabupaten Sarolangun masih sangat bergantung kepada Pemerintah Pusat.

Suryani (2012) yang meneliti di Kabupaten Sarolangun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah dalam memberikan kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan secara berfluktuasi.

Demikian juga penelitian Wiwin Marlina (2013) yang meneliti di Kabupaten Merangin menunjukkan bahwa secara keseluruhan perkembangan penerimaan daerah Kabupaten Merangin yang semakin meningkat setiap tahun anggarannya. Penelitian ini pengacuan dari skripsi Wiwin Marlina yang membedakan tahun dan tempatnya, yang mana penelitiannya pada tahun 2007-2011 dan tempat penelitiannya di Kabupaten Merangin.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang seragam penulis tertarik untuk meneliti kembali apakah Kabupaten Bungo dengan fenomena di atas hasilnya juga sama.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pertama perbedaan wilayah penelitian, penulis tertarik meneliti di Kabupaten Bungo yang semenjak awal otonomi daerah mengalami kemekaran wilayah, yang kedua tahun analisis juga berbeda, dimana dalam rentang jarak antara penelitian periode terdahulu yang dilakukan telah terjadi berbagai perubahan regulasi yang menyangkut pengeluaran keuangan daerah.

**2. METODE PENELITIAN**

**Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, data sekunder merupakan data yang diambil dari pihak lain atau data yang sudah ada dan sudah tersedia dan diolah pihak ketiga secara berkala, untuk melihat penelitian selama waktu tertentu baik dibuku-buku, literature maupun sumber lain.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtun waktu (*time series*) selama periode 2009-2013 yang terdiri dari :

1. Data penerimaan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009-2013
2. Data penerimaan Asli Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009-2013
3. Data dana perimbangan Kabupaten Bungo Tahun 2009-2013
4. Data lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Bungo Tahun 2009-2013

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari :

1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo
2. Kantor BAPPEDA Kabupaten Bungo
3. DPPKAD Kabupaten Bungo

**Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah teknik data yang menganalisisnya dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai gambaran tentang analisis penerimaan daerah di Kabupaten Bungo. Untuk menjawab tujuan pertama perkembangan penerimaan daerah dapat dilihat dengan menggunakan rumus :

$$PPRD = \frac{PRD_x - PRD_{x-1}}{PRD_{x-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

- PPRD : Perkembangan Penerimaan Daerah
- PRD<sub>x</sub> : Penerimaan Daerah Tahun Tertentu
- PRD<sub>x-1</sub> : Penerimaan Daerah Tahun Sebelumnya

Untuk menjawab tujuan kedua yaitu kontribusi sumber-sumber penerimaan daerah di Kabupaten Bungo di analisis dengan menggunakan rumus :

$$KPD = \frac{SPD}{PD} \times 100\%$$

Keterangan :

- KPD : Kontribusi Penerimaan Daerah
- SPD : Sumber Pendapatan Daerah
- PD : Penerimaan Daerah

Untuk menjawab tujuan ketiga yaitu tingkat kemandirian kemampuan keuangan daerah dapat menggunakan rumus :

$$TK = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan :

- TK : Tingkat Kemandirian
- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- TPD : Total Penerimaan Daerah

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Perkembangan Penerimaan Daerah Kabupaten Bungo

Kemampuan suatu daerah dalam mengurus rumah tangganya ditandai dengan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri. Hal ini dikarenakan keuangan daerah adalah salah satu faktor yang esensial untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan urusan daerahnya.

Melalui Table 5.1 dibawah ini dapat dilihat seberapa besar perkembangan penerimaan daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009-2013

**Tabel 2. Perkembangan Penerimaan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009-2013**

Tahun	Penerimaan Daerah (Juta Rupiah)	Perkembangan (%)
2009	520.412.279.564,53	
2010	620.682.985.437,70	19,26
2011	709.877.708.272,21	14,37
2012	793.972.772.126,72	11,84
2013	939.675.234.575,81	18,35
Rata-rata		15,95

Sumber : BPS Kabupaten Bungo

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah dengan melihat posisi Keuangan Daerah. Posisi Keuangan Daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Penerimaan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan perencanaan Keuangan Daerah dalam membiayai semua kegiatan pembangunan dalam setiap tahun anggaran.

Dalam pelaksanaan otonomi Daerah Undang-undang yang terus menerus mengalami revisi dan selalu ada perubahan sesuai dengan permintaan atas pembagian sumber-sumber Penerimaan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pendapatan Lain yang Sah. Kabupaten Bungo merupakan salah satu Kabupaten yang pelaksanaan Otonomi Daerah yang melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kinerja keuangannya untuk lebih meningkatkan kemandiriannya dalam melaksanakan Otonomi Daerah. Usaha yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan perkembangan Penerimaan Daerah dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk meningkatkan penerimaan daerah harus didukung juga dengan usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri seperti Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah. Bagi Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Lain-lain pendapatan yang sah. Selain itu juga peningkatan sebaiknya didukung dari sumber-sumber penerimaan daerah lainnya seperti,

Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Lain-lain pendapatan yang diperoleh dari penerimaan dari Provinsi, Kabupaten Kota dan penerimaan lain-lain seperti pinjaman daerah dari dalam maupun luar negeri.

Perkembangan Penerimaan Daerah merupakan indikator untuk melihat besarnya peningkatan dan penurunan jumlah penerimaan yang didapat oleh pemerintah selama periode Tahun 2009- 2013 yang terjadi pada Kabupaten Bungo.

Pada tahun 2010 perkembangan penerimaan mengalami peningkatan perkembangan dengan persentase 19,26 % berikut ini masing-masing sumber penerimaan daerah pada tahun 2010 yaitu PAD naik sebesar dengan angka perkembangan 10,80 %, dana perimbangan angka perkembangan 14,06 %, dan lain- lain pendapatan yang sah angka perkembangan sebesar 793,55 %.

Pada tahun 2011 perkembangan penerimaan daerah menurun sebesar dengan angka presentase dari tahun 2010 19,26 % menurun 14,37 %, dengan angka PAD meningkat sebesar presentase 32,36%, dana perimbangan menurun sebesar 11,74 %, dan lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan dengan angka perkembangan sebesar -78,96 %. Perkembangan penerimaan daerah tahun 2012 mengalami penurunan dengan angka presentase sebesar 11,84 %, dengan PAD kembali meningkat sebesar presentase 4,80 %, dana perimbangan dengan presentase naik 18,48 %, dan lain- lain pendapatan yang sah mengalami penurunan dengan angka penurunan perkembangan sebesar -13,84 %.

Pada tahun 2013 perkembangan penerimaan daerah sebesar presentase angka 18,35 %, serta PAD sebesar presentase 23,21 %, dana perimbangan sedikit menurun menjadi angka perkembangan 13,94 % dari tahun sebelumnya, dan lain-lain pendapatan yang sah naik dari tahun sebelumnya dengan presentase 42,04 %.

Perkembangan penerimaan daerah Kabupaten Bungo dari tahun 2009-2013 mempunyai rata-rata perkembangan dengan presentase sebesar 15,95 %. Penerimaan daerah Kabupaten Bungo selama Tahun 2009-2013 selalu mengalami peningkatan setiap tahun anggarannya, dimana perkembangan terendah terjadi pada Tahun 2012 dengan presentase 11.84 %, dan perkembangan tertinggi terjadi pada Tahun 2010 dengan presentase 19,26 %.

### **Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo**

Sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Perusahaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Berikut ini adalah jumlah perkembangan PAD dari Tahun 2009-2013.

Dari Tabel 5.1.1 dibawah ini dapat dilihat Perkembangan Penerimaan Daerah Kabupaten Bungo yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2009- 2013.

**Tabel 3. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009-2013**

<b>Tahun</b>	<b>PAD (Juta Rupiah)</b>	<b>Perkembangan (%)</b>
2009	41.391.113.660,23	
2010	45.863.785.900,70	10,80
2011	60.708.028.070,85	32,36
2012	63.622.620.030,13	4,80
2013	78.393.003.526,86	23,21
<b>Rata-rata</b>		<b>14,23</b>

*Sumber : BPS Kabupaten Bungo*

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2010 dengan presentase sebesar 10,80 %. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan dari lain-lain pendapatan dan peningkatan retribusi daerah dari tahun 2009. Perkembangan PAD Kabupaten Bungo pada tahun 2011 mengalami kenaikan dengan presentase sebesar 32,36 %, kemudian pada tahun 2012 jumlah pendapatan asli daerah menurun sebesar 4,80 % dan pada tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah pendapatan asli daerah dengan presentase sebesar 23,21 %. Peningkatan tersebut terjadi dikarenakan meningkatnya retribusi daerah Tahun 2011 sangat besar. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2009-2013 mempunyai rata-rata presentase sebesar 14,23 %.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah terendah terjadi pada Tahun 2012 sebesar 4,80 %, dan perkembangan tertinggi terjadi pada Tahun 2011 sebesar 32,36 %, karena meningkatnya jumlah komponen dari pendapatan asli daerahnya.

### **Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Bungo**

Sumber penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat yaitu dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, yang dalam hal ini selalu mengalami peningkatan dan penurunan selama Tahun 2009-2013.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 5.1.2 dibawah ini yaitu perkembangan dana perimbangan di Kabupaten Bungo dari Tahun 2009-2013 :

**Tabel 4. Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Bungo  
Tahun 2009-2013**

<b>Tahun</b>	<b>Dana Perimbangan (Juta Rupiah)</b>	<b>Perkembangan (%)</b>
2009	415.139.261.658,00	
2010	473.509.789.946,00	14,06
2011	529.100.111.208,00	11,74
2012	626.894.343.250,00	18,48
2013	714.327.809.235,00	13,94
Rata-rata		11,64

*Sumber : BPS Kabupaten Bungo*

Perkembangan ini terjadi dari tahun 2009 dan pada tahun 2010 perkembangan dana perimbangan meningkat dengan presentase sebesar 14,06 %, besarnya angka peningkatan ini dipengaruhi oleh besarnya jumlah dana alokasi umum. Pada tahun 2011 dana perimbangan mengalami penurunan yaitu sebesar 11,74 %, pada tahun 2012 perkembangan dana perimbangan meningkat kembali sebesar presentase 18,48 %, sedangkan perkembangan dana perimbangan pada tahun 2013 mengalami penurunan yaitu sebesar 13,94 %.

Perkembangan dana perimbangan dari tahun 2009-2013 mempunyai rata-rata perkembangan sebesar 11,64 %. Perkembangan dana perimbangan terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 11,74 dan perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 18,48 %.

### **Perkembangan Lain-lain Pendapatan Kabupaten Bungo**

Penerimaan daerah Kabupaten Bungo dalam sumber penerimaan lain-lain pendapatan

yang sah yang terdiri dari penerimaan dari provinsi, penerimaan dari Kabupaten dan Kota dan penerimaan lain- lain atau bantuan hibah mengalami perkembangan yang naik turun dari tahun 2009-2013.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.1.3 dibawah ini tentang perkembangan lain-lain pendapatan yang sah di Kabupaten Bungo tahun 2009-2013 :

**Tabel 5. Perkembangan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Bungo Tahun 2009-2013**

Tahun	Lain-lain yang sah (Juta Rupiah)	Perkembangan (%)
2009	63.881.904.246,30	
2010	570.819.199.537,00	793,55
2011	120.079.568.993,36	-78,96
2012	103.455.808.846,59	-13,84
2013	146.954.421.813,95	42,04
Rata-rata		148,55

*Sumber : BPS Kabupaten Bungo*

Pada tahun 2010 perkembangan lain-lain pendapatan meningkat dengan persentase sebesar 793,55 %, pada tahun 2011 perkembangan lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan yaitu sebesar -78,96 %, angka negative memberikan indikasi bahwa terjadi penurunan angka pada lain-lain pendapatan yang sah tahun 2011, pada tahun 2012 mengalami penurunan dengan presentase sebesar -13,84 % adapun yang menyebabkan menurunnya angka lain-lain penerimaan yang sah pada tahun 2012 disebabkan karena tidak adanya jumlah bantuan untuk pembangunan dan bantuan hibah. Pada tahun 2013 perkembangan pendapatan lain-lain yang sah meningkat kembali yaitu sebesar 42,04 %.

Perkembangan lain-lain pendapatan yang sah dari tahun 2009 sampai tahun 2013 mempunyai rata-rata perkembangan dengan angka presentase perkembangan sebesar 148,55 %. Perkembangan terkecil terjadi pada tahun 2012 sebesar -13,84 % dikarenakan jumlah lain-lain pendapatan yang sah lebih kecil dari pada tahun 2011, dan perkembangan dana perimbangan terbesar terjadi pada tahun 2010 % sebesar 793,55 %. Dengan rata-rata perkembangan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 148,55 %.

#### **Kontribusi Sumber Penerimaan Daerah**

Untuk dapat melihat seberapa besar sumbangan atau kontribusi dari masing- masing sumber penerimaan daerah di Kabupaten Bungo pada tahun anggaran 2009-2013 dengan menggunakan alat analisis kontribusi atau masing-masing penerimaan daerah terhadap total penerimaan daerah Kabupaten Bungo.

Kontribusi masing-masing sumber penerimaan daerah ini dapat digunakan sebagai alat dan perhitungan penting yang sangat berguna untuk pemerintah daerah didalam membuat kebijakan pembangunan otonomi untuk membiayai semua kegiatan daerah dalam rangka peningkatan sumber- sumber penerimaan daerah.

Beberapa kontribusi sumber- sumber tersebut meliputi kontribusi sumber Pendapatan Asli Daerah, kontribusi dana perimbangan, kontribusi lain-lain penerimaan daerah yang sah dari tahun anggaran 2009-2013.

#### **Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penerimaan Daerah**

Kontribusi atau sumbangan dari pendapatan asli daerah (PAD) terhadap penerimaan daerah Kabupaten Bungo pada Tahun 2009-2013 mengalami peningkatan dan penurunan, pada 2009 kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah Kabupaten Bungo

sebesar 7,95 %, dan pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 7,38 %, dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 8,55 %, pada tahun 2012 sedikit mengalami penurunan sebesar 8,01 %, pada tahun 2013 kembali mengalami peningkatan sebesar 8,34 %. Kontribusi pendapatan asli daerah tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 8,55 % dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 7,38 %, dengan angka rata-rata kontribusi dari tahun 2009-2013 sebesar 8,05 %.

Melalui tabel 5.2.1 dibawah ini dapat dilihat besarnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Bungo :

**Tabel 6. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan daerah Kabupaten Bungo 2009-2013**

Tahun	PAD (Rp)	Penerimaan Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2009	41.391.113.660,23	520.412.279.564,53	7,95%
2010	45.863.785.900,70	620.682.985.437,70	7,38%
2011	60.708.028.070,85	709.877.708.272,21	8,55%
2012	63.622.620.030,13	793.972.772.126,72	8,01%
2013	78.393.003.526,86	939.675.234.575,81	8,34%
Rata-rata			8,05%

*Sumber : BPS Kabupaten Bungo*

Berdasarkan hasil penelitian terlihat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan daerah Kabupaten Bungo masih mempunyai penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang belum memberikan sumbangan yang belum berarti terhadap penerimaan daerah Kabupaten Bungo.

#### **Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap Penerimaan Daerah**

Dana Perimbangan yang merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat sangat dominan mempengaruhi jumlah penerimaan daerah keseluruhan yang terjadi pada penerimaan daerah Kabupaten Bungo. Kontribusi dana perimbangan terhadap penerimaan daerah adalah sumbangan peranan dari dana perimbangan itu sendiri atas penerimaan daerah secara keseluruhan di Kabupaten Bungo.

Dengan angka kontribusi atau sumbangan dana perimbangan sebesar 79,77 % pada tahun 2009, tetapi pada tahun 2010 kontribusi dana perimbangan sedikit mengalami penurunan sebesar 76,28 %, pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 74,53 %, sedangkan pada tahun 2012 meningkat kembali sebesar 78,95, dan pada tahun 2013 kontribusi dana perimbangan kembali menurun sebesar 76,01 %.

Melalui tabel 5.2.2 dibawah ini dapat dilihat besarnya kontribusi dana perimbangan terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Bungo :

**Tabel 7. Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Bungo 2009-2013**

Tahun	Dana Perimbangan (Rp)	Penerimaan Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2009	415.139.261.658,00	520.412.279.564,53	79,77%
2010	473.509.789.946,00	620.682.985.437,70	76,28%
2011	529.100.111.208,00	709.877.708.272,21	74,53%
2012	626.894.343.250,00	793.972.772.126,72	78,95%
2013	714.327.809.235,00	939.675.234.575,81	76,01%
Rata-rata			77,11%

*Sumber : BPS Kabupaten Bungo*

Secara keseluruhan rata-rata kontribusi dana perimbangan terhadap penerimaan daerah pada tahun 2009-2013 meningkat dengan presentase sebesar 77,11 %. Melihat dari rata-rata kontribusi dana perimbangan dari tahun 2009 sampai tahun 2013 dapat dikatakan pemerintah daerah Kabupaten Bungo masih bergantung pada keuangan pemerintah pusat yang bersumber dari pembiayaan dana perimbangan. Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah Terhadap Penerimaan Daerah Pada kontribusi sumber penerimaan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah terhadap penerimaan daerah Kabupaten Bungo dari tahun 2009-2013. Pada tahun 2009 kontribusi lain-lain pendapatan yang sah sebesar 12,27 %, meningkat pada tahun 2010 sebesar 91,96 % kemudian mengalami penurunan pada tahun 2011 sebesar 16,91 %, pada tahun 2012 menurun sebesar 13,03 % sedangkan pada tahun 2013 kontribusi lain-lain pendapatan yang sah sedikit meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 15,63 %. Kontribusi sumber penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan mengalami naik turun, angka kontribusi tertinggi pada tahun 2010 sebesar 91,96 % dan angka kontribusi terendah pada tahun 2009 sebesar 12,27 %, serta mempunyai rata-rata angka kontribusi sebesar 29,96 %.

Untuk dapat lebih mengetahui kontribusi lain-lain pendapatan daerah terhadap total penerimaan daerah dapat dilihat pada tabel 5.2.3 dibawah ini :

**Tabel 8. Kontribusi Lain-lain Pendapatan Terhadap Penerimaan Daerah Tahun 2009-2013**

Tahun	Lain-lain pendapatan yang sah (Rp)	Penerimaan Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2009	63.881.904.246,30	520.412.279.564,53	12,27%
2010	570.819.199.537,00	620.682.985.437,70	91,96%
2011	120.079.568.993,36	709.877.708.272,21	16,91%
2012	103.455.808.846,59	793.972.772.126,72	13,03%
2013	146.954.421.813,95	939.675.234.575,81	15,63%
Rata-rata			29,96%

Sumber :BPS Kabupaten Bungo

Dilihat dari angka rata-rata kontribusi lain-lain penerimaan daerah yang sah sedikit memberikan pengaruh terhadap jumlah penerimaan daerah Kabupaten Bungo karena selalu terjadi peningkatan yang cukup besar pada tahun- tahun tertentu dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya.

**Tingkat Kemandirian Penerimaan Daerah Kabupaten Bungo**

Tingkat kemandirian kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pembangunan Kabupaten Bungo merupakan suatu alat pengukuran kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah dalam mengelola semua pembiayaan yang dilakukan pemerintah yang dapat dilihat dari sumber penerimaan daerah yang berasal dari PAD terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat dimana dana perimbangan yang disalurkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bentuk pemerataan pembangunan serta stabilitasi suatu daerah. Dalam melaksanakan otonomi daerah suatu pengukuran kemampuan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan menimbulkan hubungan yang situasional setiap masing- masing daerah.

Pengukuran kemampuan keuangan otonomi daerah yang mandiri dapat menyebabkan besarnya sumbangan PAD dalam mempengaruhi penerimaan daerah secara keseluruhan. Sehingga akan dapat mencerminkan tingkat kemandirian yang akhirnya dapat

menimbulkan pola hubungan keuangan daerah dengan keuangan pemerintah pusat yang berbeda-beda. Sumber pembiayaan yang berasal dari daerah yang berbentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pembiayaan yang sangat menunjang pelaksanaan sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi, apabila penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat masih dominan dari pada pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, hal ini dapat mengakibatkan pelaksanaan otonomi suatu daerah seutuhnya belum bisa dilaksanakan.

Tingkat kemandirian kemampuan PAD tahun 2010 menurun pada angka 7,38% yang berpola hubungan instruktif terhadap keuangan pemerintah pusat dimana daerah masih belum mampu melaksanakan otonominya dan daerah Kabupaten Bungo masih sangat bergantung dengan pembiayaan yang bersumber dari dana perimbangan. Pada tahun 2012 tingkat kemandirian kemampuan pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 8,55 % tetapi peningkatan tersebut tidak sepenuhnya berpengaruh terhadap kemandirian kemampuan keuangan daerah otonomi dan masih terdapat pada pola hubungan yang instruktif. Tingkat kemandirian kemampuan keuangan pendapatan asli daerah pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 8,01 % yang berpola hubungan instruktif, kemudian pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 8,34 % dan masih terdapat pada pola hubungan yang instruktif yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah, karena daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemandirian kemampuan keuangan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bungo tahun 2009-2013 dapat dilihat dalam tabel 5.3 dibawah ini :

**Tabel 9. Tingkat Kemandirian dan Pola Hubungan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009-2013**

No	Tahun	Kemandirian (%)	Keuangan	Pola Hubungan
1	2009	7,95	Rendah Sekali	Instruktif
2	2010	7,38	Rendah Sekali	Instruktif
3	2011	8,55	Rendah Sekali	Instruktif
4	2012	8,01	Rendah Sekali	Instruktif
5	2013	8,34	Rendah Sekali	Instruktif

*Sumber : BPS Kabupaten Bungo*

Dari tabel 5.3 diatas tersebut terlihat bahwa tingkat kemandirian kemampuan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bungo pada tahun 2009-2013 masih belum dapat melaksanakan pembiayaan otonominya karena masih mengandalkan sumber pembiayaan dari pemerintah pusat yang berbentuk dari dana perimbangan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis perkembangan Penerimaan Daerah menurut sumber penerimaan daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009-2013 terlihat rata-rata keseluruhan perkembangan penerimaan daerah sebesar 15,95%. Hal ini menunjukkan secara keseluruhan perkembangan penerimaan daerah Kabupaten Bungo semakin meningkat

- setiap tahun anggarannya dari tahun 2009-2013.
2. Kontribusi dari masing-masing penerimaan daerah terhadap total penerimaan daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009-2013, dimana kontribusi paling kecil dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya adalah kontribusi yang berasal dari PAD dengan rata-rata kontribusi sebesar 8,04%, dapat dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo masih belum mampu sepenuhnya untuk mengelolah sumber-sumber keuangannya dan masih bergantung pada Pemerintah Pusat.
  3. Persentase tingkat kemandirian keuangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo terhadap Keuangan Pemerintah Pusat pada tahun 2009-2013 pada persentase antara 7,38% sampai dengan 8,55% yang mempunyai pola hubungan instruktif yang artinya bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah karena masih belum mampu melaksanakan otonomi daerah.

### Saran

Suatu pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bungo dapat menggunakan sumber penerimaan secara efektif dan efisien, sehingga pembiayaan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik.

Sebaiknya pemerintah daerah lebih meningkatkan lagi dalam penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah karena sumber penerimaan dari PAD akan dapat lebih membantu pertumbuhan pembangunan daerah tanpa harus dibantu dari sumber penerimaan dari Dana Perimbangan, dalam hal ini terlihat sangat jelas bahwa pemerintah Kabupaten Bungo masih didominasi oleh bantuan pemerintah pusat.

Dalam upaya meningkatkan tingkat kemandirian kemampuan sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan pembangunan daerah yang berasal dari dalam daerah sendiri dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih terarahkan untuk mengelola sumber PAD suatu daerah, karena dengan berkualitasnya SDM, maka pengelolaan PAD akan lebih efektif sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah khususnya dalam pendapatan asli daerah di Kabupaten Bungo.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aidayani,(2013),”*Analisis Struktur Penerimaan Daerah Kabupaten Sarolangun (2006-2010)*”, Skripsi Fakultas Ekonomi UNJA Sarolangun. BPS Kabupaten Muara Bungo (2002), *Realisasi Penerimaan Daerah*, Kabupaten Muara Bungo.
- BPS Kabupaten Muara Bungo (2012), *Muara Bungo Dalam Angka*, Kabupaten Muara Bungo.
- Darise,Nurlan,dkk,(2009),”*Pengelolaan Keuangan Daerah*”.PT. Indeks.Jakarta.
- Djumhana Muhamad, (2007), ”*Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang- undangan di bidang Keuangan Daerah*”. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Dahmiri, S. D. (2010). Model Permintaan Hutang Luar Negeri Pemerintah dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora*, 12(1), 43409.
- Halim, (2002), “ *Pengendalian Sumber- Sumber Pajak dan Retribusi Daerah*”. Jakarta : Selemba Empat.
- Haris.(2005),”*Analisa Penerimaan Daerah Di Kabupaten Sarolangun (2002- 2003)*”. Skripsi Fakultas Ekonomi UNJA.
- Harsey dan Blanchard,(1989),”*Konsep Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah*”,UI-Press Jakarta.
- Mamesah,(2004),”*Sistem Administrasi Keuangan Daerah*”.Cetakan Pertama.PT.

- Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mardiasmo,(2002).”*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*”. Penerbit Andi : Yogyakarta.
- Marlina,Wiwin,(2013),”*Analisis Penerimaan Daerah di Kabupaten Merangin (2007-2011)*”.Skripsi Fakultas Ekonomi UNJA Sarolangun.
- Parmadi, Rahmadi Selamat,(2010),”*Modul Keuangan Daerah*”.Universitas Jambi. Jambi.
- Pasal 29 Undang-undang No 22 Tahun (1999) “*dicantumkan sumber- sumber pendapatan daerah*”.
- Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 Pasal 1, Tentang Pengelolaan Keuangan daerah.
- Republik Indonesia,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 30 Tahun 2007 *Tentang Penggunaan Dana Perimbangan Khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK)*.
- Rulriyadi, (2008), *Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)Kabuppaten Sarolangun*, Skripsi FE- Universitas Jambi.
- Suherman,(2004),”*Perkembangan dan Struktur Pendapatan Daerah di Kota Jambi*”. Tesis tidak dipublikasikan MEP UNJA,Jambi.
- Suryani,(2012),”*Analisis Perkembangan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun (2007- 2011)*”,Skripsi Fakultas Ekonomi UNJA Sarolangun.
- Suparmoko,(2002),”*Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembanguna Daerah*”, Grafindo Jakarta.
- Suparmoko,(2008),”*Pengertian RetribusiDaerah*”. Grafindo Jakarta.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.”*tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah dan kewenangannya kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri*”.
- Warsito, dkk.(2008).”*Akuntansi Sektor Publlik : Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*”. UNDIP : Semarang.
- Widjaja,HAW,(2011),”*Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*”,PT Rajagrafindo Persada.
- Yani,Ahmad,(2008), “*Pengertian Dan Devinisi Pajak Daerah*”, Jakarta.
- Yani,Ahmad.(2013),”*Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*”. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.